



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**RANCANGAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BUKIK BARISAN  
TAHUN 2020**

**SARILAMAK, JULI 2019**

## KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Bukik Barisan telah dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 serta menindaklanjuti ayat (4) pasal 140 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, maka Rancangan akhir Renja Perangkat daerah Tahun 2020 yang telah diverifikasi dan sempurnakan untuk dicetak menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Oleh karena itu Kecamatan Bukik Barisan sebagai salah satu Perangkat Daerah di kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun dan menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 sesuai dengan Kaedah dan ketentuan yang berlaku.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2020 ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Banja Loweh, Juli 2019



NIP. 19651220 198603 1 005



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2020.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2020.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

( 1 ) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
  - 2.3 isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
  - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
  - 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **P E L A K S A N A A N**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2020 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Renja PD.

##### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2020.

#### **BAB V**

#### **P E M B I A Y A A N**

##### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2019.

#### **BAB VI**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

**WIDYA PUTRA**

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
**ERI FORTUNA, SH**  
**NIP.19660104199303 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019 NOMOR 39

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Daftar Tabel</b>	ii
<b>I. Pendahuluan</b>	I.1 - I.6
1.1 Latar Belakang.....	I.1 - I.3
1.2 Dasar Hukum.....	I.4 - I.5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I.5 - I.6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I.6
<b>II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan Tahun Lalu</b>	II.1 – II.36
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bukik Barisan.....	II.1 – II.15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kec. Bukik Barisan.....	II.15 – II.23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukik Barisan.....	II.23 – II.26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II.26 – II.35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II.35 – II.36
<b>III. Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah</b>	III.1 – III.6
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III.1 – III.3
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2020.....	III.3 – III.4
3.3 Program dan Kegiatan.....	III.4 – III.6
<b>IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah</b>	IV.1 – IV.2
<b>V. PENUTUP</b>	V.1 – V.2

## DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Bukik Barisan dan Pencapaian Renstra Kec. Bukik Barisan s/d Tahun 2020	II.2-II.14
2.2	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020	II.27-II.34
2.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Keentingan	II.36
3.1	Program dan kegiatan Kecamatan Bukik Barisan	III.4-III.6
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD tahun 2020 dan Prakiraan Maju tahun 2021	IV.3-IV.6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimana Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 86 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Kerja Pembangunan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025.

Penyusunan Renja PD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan Renja PD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke tiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Bukik Barisan juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan (Renja Kecamatan Bukik Barisan). Renja Kecamatan Bukik Barisan ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Bukik Barisan dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2020, Kecamatan Bukik Barisan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Kecamatan Bukik Barisan sebagai berikut :

- I. Persiapan penyusunan;
  - II. Penyusunan rancangan awal;
  - III. Penyusunan rancangan;
  - IV. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah
  - V. Perumusan rancangan akhir dan
  - VI. Penetapan
- I. Persiapan penyusunan Meliputi :
- a. Mengusulkan Nama-nama personil yang akan mengisi Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukik Barisan tahun 2020 ke Bapelitbang untuk dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
  - b. Mengadakan orientasi penyusunan Renja Kecamatan Bukik Barisan yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.
- II. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Pada awal bulan Juni 2019 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Bukik Barisan oleh tim penyusun. Hasil evaluasi hasil Renja tahun 2018, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun 2019. Penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Bukik Barisan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

### III. Penyusunan rancangan

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif.

### IV. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi Kecamatan Bukik Barisan dan OPD terkait seperti Bapelitbang, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Koordinasi dilaksanakan pada Bulan Juni 2019.

### V. Perumusan rancangan akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Kecamatan Bukik Barisan.

### VI. Penutup

Dalam hal penetapan Renja, Kecamatan Bukik Barisan melakukan pemeriksaan akhir dan Koordinasi dengan Bapelitbang tentang Rancangan Akhir Bukik Barisan tahun 2020.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 Nomor 140);
  17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 nomor 39).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Bupati Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukik Barisan.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan Kecamatan Bukik Barisan.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bukik Barisan untuk Tahun 2020.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Bukik Barisan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2020.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan seksi-seksi di Kecamatan Bukik Barisan.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bukik Barisan pada Tahun 2020.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Kecamatan Bukik Barisan, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Bukik Barisan, analisis kinerja pelayan Kecamatan Bukik Barisan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bukik Barisan, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah dan program dan kegiatan.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah yang memuat Rencana pendanaan tahun 2020 dan tahun Berencana Maju (2021).
- V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bukik Barisan**

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Bukik Barisan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Bukik Barisan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Bukik Barisan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Bukik Barisan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Bukik Barisan; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Bukik Barisan, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bukik Barisan sampai dengan Tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Bukik Barisan dan Pencapaian Renstra Kec. Bukik Barisan s/d Tahun 2018  
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	80%	
X	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	1200 bh	240 bh	240 bh	240 bh	100 %	240 bh	960 bh	80%
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019	
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X xx 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	7 Unit	7	-	-	100 %	-	7 unit	100%
X xx 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya administrasi keuangan dan barang dilingkungan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%
X xx 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianyanya kebutuhan alat dan jasa kebersihan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019	
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X   xx   01   09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	90 unit	36 Unit	18 unit	18 unit	100%	18 unit	72 unit	80%
X   xx   01   10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%
X   xx   01   11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan untuk keperluan operasional kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%
X   xx   01   12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk keperluan operasional	15 unit	3 Unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	60%
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat	2600 porsi	520 porsi	520 porsi	520 porsi	100 %	520 porsi	2080 porsi	80%
X	xx	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		keluar daerah											
<b>X</b>	<b>xx</b>	<b>02</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
X	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas yang layak pakai untuk operasional pegawai	2 unit kend roda 2	3 unit	-	-	0%	-	3 unit	150%
X	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang lengkap	4 unit	1 unit	1 thn	1 thn	100%	0	2 unit	50%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		dan memadai untuk proses pemerintahan											
X	xx	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Sarana Mebeleur,meja,l emari,kursi	80 unit	33 unit	33 unit	33 unit	100%	6 unit	72 unit	90%
X	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya kondisi gedung kantor sehingga layak dan nyaman digunakan sebagai tempat bekrja bagi pegawai	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	0	2 unit	40%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihanya kondisi kendaraan dinas sehingga siap dipergunakan setiap saat dibutuhkan	50 unit	20 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	40 unit	80%
<b>X</b>	<b>xx</b>	<b>03</b>		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
X	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai	28 stel	14 stel	-	-	100%	-	14 stel	50%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase perkembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<b>100%</b>										
X	xx	06	01	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja	Adanya LAKIP, LPPD dan laporan ikhtisar kinerja dan laporaan realisasi keuangan dan fisik program dan kegiatan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019	
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 15	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat.	<b>100%</b>	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	48 bulan	48 bulan	80%
1 05 15 08	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Terlaksananya Seleksi MTQ,Tk.Kec dan Kab,Lomba Nagari,PHBN dan Pekan Budaya.	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%
1 06 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat.	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019	
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 15 02	Pemebdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Tersedianya pemberdayaan LKAM,PKK,Karang Tarunan	25 nag	5 nag	5 nag	5 nag	100%	10 nag	20 nag	80%
<b>1 02 16</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 02 16 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musyawarah dalam membangun desa.	200 org	40 org	40 org	40 org	100%	80 org	160 org	80%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	02	23											
1	02	23											
1	02	23	06	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pelayanan Terpadu terhadap masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	02	23	06	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya pelayanan Administrasi terpadu PATEN	60 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80%
1	02	36		Program Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaran	Persentase Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaran	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019	
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik</b>	Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik								
	01 Bimbingan supervisi dan pengawasan Penyusunan APB Nagari laporan Keuangan nagari LKPJ dan publik	Terlaksananya pengawasan Penyusunan APB Nagari laporan Keuangan nagari LKPJ dan publik	25 nag	5 Nag	5 Nag	5 Nag	100%	10 Nag	20 Nag	80%
	02 Bimbingan supervisi dan pengawasan dana Nagari	Terlaksananya Bimbingan supervisi dan pengawasan	25 nag	5 Nag	5 Nag	5 Nag	100%	10 Nag	20 Nag	80%

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019		
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		dana Nagari									
	03	Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	terlaksananya Kegiatan Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	25 nag	5 Nag	5 Nag	5 Nag	100%	10 Nag	20 Nag	80%
	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan lainnya	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan lainnya	25 nag	5 Nag	5 Nag	5 Nag	100%	10 Nag	20 Nag	80%

Dari tabel 2.1 diatas ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sesuai renstra 2016-2021, hal ini dapat di terangkan sebagai berikut:

- a) Penyediaan peralatan gedung kantor, ditargetkan sesuai renstra 2016-2021 adalah 4 Unit namun hingga tahun 2019 tercapai 2 unit yang berarti 50% dari target yang telah ditetapkan. hal ini disebabkan Anggaran yang telah ditetapkan di DPA tidak memenuhi anggaran sesuai spek yang dibutuhkan.
- b) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, ditargetkan sesuai renstra 2016-2021 adalah 5 Unit namun hingga tahun 2019 tercapai 2 unit yang berarti 40% dari target yang telah ditetapkan. hal ini disebabkan Anggaran yang telah ditetapkan di DPA di rasionalisasi untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai IKU Kecamatan Bukik Barisan.
- c) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, ditargetkan sesuai renstra 2016-2021 adalah 15 Unit namun hingga tahun 2019 tercapai 9 unit yang berarti 60% dari target yang telah ditetapkan. hal ini disebabkan Anggaran yang telah ditetapkan di DPA di rasionalisasi untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai IKU Kecamatan Bukik Barisan.
- d) Pengadaan pakaian dinas, ditargetkan sesuai renstra 2016-2021 adalah 28 Stel namun hingga tahun 2019 tercapai 14 unit yang berarti 50% dari target yang telah ditetapkan. hal ini disebabkan untuk pengadaan pakaian dinas hanya dianggarkan 1 kali dalam 2 tahun dan satu paket (14 stel) dianggarkan pada akhir tahun Restra 2016-2021.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kec. Bukik Barisan**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD, yang disesuaikan menurut OPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

#### Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukik Barisan

N O	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan oleh Inspektoral di tahun N	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	55	60	70	70	-	-	70	70	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sesuai dasar PermenPAN No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.M.PAN/2/2004	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	80	80	80	90	-	86,74 %	80%	90%	
3	Jumlah nagari yang berstatus	Jumlah Nagari yang berstatus	Meningkatnya Kualitas Tata	4 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	-	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
	berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan bulanan dan laporan realisasi kinerja	berkembang dan maju tahun N	Kelola Pemerintahan Nagari									
4	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	Jumlah Nagari yang Menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu/Jumlah Nagari x 100%	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	40%	60%	60%	60%	80%	80%	40%	40%	
5	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	(Jumlah BUM Nagari yang aktif tahun N) / (Jumlah seluruh BUM Nagari) x 100%	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	50%	50%	60%	80%	-	50%	60%	80%	

Dari tabel diatas dapat di uraikan capaian realisasi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan administrasi perkantoran.

### Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan	80	-	-	55	-	

#### a. Indikator Kinerja 2

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 0% yaitu dari target yang di rencanakan adalah 55 dengan realisasi 0 Dokumen hal ini dikarenakan :

1. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencakup 26 OPD yang menjadi sampel dari 45 OPD yang ada dan Kecamatan Bukik Barisan tidak termasuk OPD yang dinilai.
2. Belum berjalannya mekanisme penilaian dengan baik.
3. Penilaian hanya berfokus pada target peningkatan Capaian nilai SAKIP.
4. Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai.

## 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

### Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	-	-	80	86,74	

#### a. Indikator Kinerja 1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 107,5% yaitu dari target yang di rencanakan adalah 80 dengan realisasi 86,74 hal ini dikarenakan :

1. Realisasi survei IKM telah dilakukan pada bulan Desember 2018 dengan 37 orang Responden.

2. Pelayanan terhadap Masyarakat untuk pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilakukan dengan optimal.
3. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan terus ditingkatkan dengan anggaran yang tersedia.

### 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

#### Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan	5 Nagari	-	-	4 Nagari	5 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	80 %	80%	80%	40%	40%	

#### a. Indikator Kinerja 1

Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan. Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 5 Nagari yaitu sebagaimana tabel berikut;

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Banja Loweh	Berkembang
2	Maek	Berkembang
3	Koto Tengah	Berkembang
4	Sungai Naniang	Berkembang
5	Baruah Gunuang	Berkembang

Realisasi tersebut lebih tinggi dari target yang di rencanakan adalah 4 Nagari realisasi 120% hal ini dikarenakan :

1. Nagari yang telah berkembang di Kecamatan Bukik Barisan pada tahun 2017 telah berjumlah 5 nagari.
2. Optimalisasi terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Bukik Barisan untuk pembedayaan dan Pembangunan Nagari.
3. Optimalisasi atas anggaran untuk pemberdayaan dan monitoring evaluasi di Nagari.

**b. Indikator Kinerja 2**

Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu. Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 2 nagari atau 40% dari Jumlah nagari yang ada. Nagari tersebut adalah Nagari Sungai Naniang dan Nagari Baruah Gunung dari target yang di rencanakan adalah 40% realisasi 100% hal ini dikarenakan :

1. APB Nagari disusun atas musyawarah antara pemerintahan Nagari dengan Bamus Nagari, ketidak sesuaian antara Bamus dan pemerintahan menghambat realisasi selesainya APB tepat waktu.
2. Kurang Optimalnya terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Bukik Barisan untuk Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur nagari.
3. Kurang Optimalnya pemanfaatan Anggaran yang memadai dari Anggaran APBD Lima Puluh Kota yang dialokasikan di Nagari.

**4. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nagari**

**Sasaran Strategis IV**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%	-	-	50%	80%	

#### a. Indikator Kinerja 1

Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif .Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 80% yaitu ada 4 (empat) Nagari yang Bumnagnya aktif yaitu Nagari Maek, Nagari Koto Tengah, Nagari Sungai Naniang dan Nagari Baruah Gunuang. Hal ini adalah 80% dari target yang di rencanakan adalah 50% telah direalisasikan realisasi 160% hal ini dikarenakan :

1. Optimalnya pembinaan terhadap Nagari dan Bumnag nagari.
2. Optimalisasi terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Bukik Barisan untuk Pembinaan dan Pemberdayaan.
3. Dukungan Aparatur nagari dan Instansi terkait dalam mewujudkan Optimalisasi Perkembangan Badan Usaha Nagari.
4. Optimalisasi Anggaran Anggaran yang tersedia.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Bukik Barisan pada tahun 2018 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah di tetapkan namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, bahkan ada indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

##### 3.1.1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yakni:

- ✓ Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari Aparatur Sipil Negara yang ada.
- ✓ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah ada, Pemerintah Nagari dan Unsur-unsur masyarakat.
- ✓ Sarana dan prasarana penunjang yang di upayakan untuk di optimalkan.
- ✓ Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
- ✓ Dukungan anggaran yang mencukupi.

##### 3.1.1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya dengan sumber

daya yang ada, menghindari yang pemborosan anggaran dan dengan Sumber Daya Manusia Kantor Camat yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

### 3.1.1.c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

#### A. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- ✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan makanan dan Minuman
- ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

#### B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Pengadaan Bebeleur
- ✓ Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- ✓ Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

#### A. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

#### B. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut.

- ✓ Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa

#### C. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- ✓ Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

#### D. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- ✓ Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

- E. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - ✓ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- F. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan peningkatan pelayanan publik
  - ✓ Bimbingan superfisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan Nagari LKPJ dan Publik
  - ✓ Bimbingan supevisi dan pengawasan dana nagari
  - ✓ Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - ✓ Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial, raskin dan kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan program/ kegiatan tersebut nampak masih banyak kegiatan yang belum sesuai dengan pencapaian terkait dengan pencapaian indikator kinerja, yakni optimalisasi pelayanan yang perlu dimunculkan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga kegiatan pembinaan sesuai bidang yang ada seperti pemerintahan nagari, keuangan nagari dan pemberdayaan nagari.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Bukik Barisan pada tahun 2018 sudah memenuhi target, yakni 100 %.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukik Barisan**

Pada Bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bukik Barisan terhadap Masyarakat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bukik Barisan.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan SDGs (Suistanable Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bukik Barisan .

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2020.

Menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

*Fungsi Camat :*

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Berdasarkan analisis gambaran Tupoksi Camat, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Permasalahan dan isu penting penyelenggaraan tupoksi dan IKU OPD Kecamatan Bukik Barisan antara lain :

1. Lokasi geografis, Luas Wilayah dan dan jumlah Penduduk menjadi hambatan pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Bukik Barisan.
2. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencakup 26 OPD yang menjadi sampel dari 45 OPD yang ada dan Kecamatan Bukik Barisan tidak termasuk OPD yang dinilai.
3. Nilai IKM terhadap pelayanan Publik Kecamatan Bukik Barisan
4. Nilai Status Berkembang dan Maju 5 Nagari yang ada di Kecamatan Bukik Barisan belum ada perubahan.
5. Rendahnya Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu
6. Belum Optimalnya Perkembangan Bumrag Nagari.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kecamatan Bukik Barisan. Kecamatan Bukik Barisan merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kinerja pelayanan Kecamatan Bukik Barisan pada tahun 2019 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Melakukan pelayanan di Kantor Camat dengan mengumpulkan seluruh bahan administrasi kependudukan dan akan secara berkala mengajukan pengurusannya ke kantor Catatan Sipil dan akan di konfirmasi kepada masyarakat yang melakukan pengurusan setelah selesai dokumen kependudukan selesai.

2. Tetap melakukan penyusunan SAKIP dengan benar, sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu.
3. Nilai pengukuran IKM telah baik dan akan dilakukan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
4. Lebih Mengintensifkan monitoring dan pembinaan ke Nagari untuk peningkatan Status Nagari yang Masih Berkembang menjadi Maju dan realisasi penetapan APB Nagari tepat waktu.
5. Lebih mendorong perkembangan BUMNAG yang belum berkembang dan melakukan pembinaan Bumrag yang aktif agar lebih maju.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Kecamatan Bukik Barisan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020  
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Kec. Bukik Barisan

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana/pagu	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>207.920.900</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>207.920.900</b>	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	240 bh	1.900.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	240 bh	1.900.000	Rutin kantor
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan Listrik	12 bulan	3.300.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan Listrik	12 bulan	3.300.000	Rutin kantor
3.	Penyediaan jasa	Kec.	Tersedianya	12	62.600.000	Penyediaan	Kec.	Tersedianya	12	62.600.000	Rutin

	administrasi keuangan	Bukik Barisan	administrasi keuangan	bulan		jasa administrasi keuangan	Bukik Barisan	administrasi keuangan	bulan		kantor
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	16.278.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	16.278.000	Rutin kantor
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya jasa pelaratan dan perbaikan peralatan dan perlengkapankantor	18 unit	2.540.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya jasa pelaratan dan perbaikan peralatan dan perlengkapankantor	18 unit	2.540.000	Rutin kantor
6.	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Alat Tulis kantor	12 bulan	8.635.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Alat Tulis kantor	12 bulan	8.635.000	Rutin kantor
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .	12 bulan	5.398.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .	12 bulan	5.398.000	Rutin kantor
8.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Komponen listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.291.000	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Komponen listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.291.000	Rutin kantor
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan	3 unit	6.000.000	Penyediaan peralatan dan	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan	3 unit	6.000.000	Rutin kantor

	kantor	an	Gedung kantor			perlengkap an kantor	an	Gedung kantor			
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya makanan dan minuman kantor	520 porsi	26.000.000	Tersedianya Bahan bacaan	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya makanan dan minuman kantor	520 porsi	26.000.000	Rutin kantor
12.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	73.979.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	73.979.000	Rutin kantor
<b>II</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Kec. Bukik Barisan			<b>135.475.000</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Kec. Bukik Barisan			<b>103.850.000</b>	
1	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas /operasional	-	-	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas /operasional	-	-	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Peralatan gedung kantor	-	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya Peralatan gedung kantor	1 pkt	0	Penunjang Pelayanan
3	Pengadaan Mebeleur	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya sarana mebeleur	33 Unit	15.700.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya sarana mebeleur	4 Unit	15.700.000	Penunjang Pelayanan

4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	1 unit	46.625.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	1 unit	15.000.000	Penunjang Pelayanan
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas	12 bulan	72.150.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas	12 bulan	72.150.000	Penunjang Pelayanan
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kec. Bukik Barisan		-	-	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kec. Bukik Barisan		-	-	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya.	-	-	Penunjang Disiplin PNS
IV	<b>Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Kec. Bukik Barisan		1 Keg	<b>27.745.000</b>		Kec. Bukik Barisan		1 Keg	<b>27.745.000</b>	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya capaian laporan laporan realisasi	12 bulan	27.745.000	Penyusunan laporan capaian	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya capaian laporan laporan realisasi	12 bulan	27.745.000	Pelayan pada

	realisasi kinerja OPD	an	anggaran			kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	an	anggaran			masya rakat
<b>V</b>	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	Kec. Bukik Barisan			<b>43.785.000</b>	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	Kec. Bukik Barisan		-	<b>43.785.000</b>	
1	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya koordinasi dengan pemerintahan nagari	12 bulan	43.785.000	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Kec. Bukik Barisan	Tersedianya koordinasi dengan pemerintahan nagari	12 bulan	43.785.000	Monitoring dan Pembi naan
	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>				<b>59.113.000</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>				<b>59.113.000</b>	
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec. Bukik Barisan	Adanya pelayanan Prima	12 Bulan	59.113.000	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec. Bukik Barisan	Adanya pelayanan Prima	12 Bulan	59.113.000	Pelaya nan masya rakat

<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	Kec. Bukik Barisan			<b>79.435.000</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	Kec. Bukik Barisan			<b>222.222.000</b>	
1	Pemebudayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Kec. Bukik Barisan	Pemberdayaan PKK, LKAM dan Karang Taruna	5 nagari	79.435.000	Pemebudayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Kec. Bukik Barisan	Pemberdayaan PKK, LKAM dan Karang Taruna	5 nagari	222.222.000	Pemberdayaan Masyarakat
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	Kec. Bukik Barisan			<b>16.185.000</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	Kec. Bukik Barisan			<b>16.185.000</b>	
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec. Bukik Barisan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	40 org	16.185.000	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec. Bukik Barisan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	40 org	16.185.000	Musyawarah nagari
<b>VII I</b>	<b>Program Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan</b>	Kec. Bukik Barisan			<b>81.874.000</b>	<b>Program Pembinaan dan pengawasan</b>	Kec. Bukik Barisan			<b>81.874.000</b>	

	<b>Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik</b>					<b>n Penyeleng gan Pemerintah an Nagari dan Peningkata n Pelayanan Publik</b>					
	Bimbingan supervisi dan pengawasan Penyusunan APB Nagari laporan Keuangan nagari LKPJ dan publik	Kec. Bukik Barisan	Adanya tim pengawasan dana nagari	5 nagari	27.150.000	Bimbingan supervisi dan pengawasa n Penyusunan APB Nagari laporan Keuangan nagari LKPJ dan publik	Kec. Bukik Barisan	Adanya tim pengawasan dana nagari	5 nagari	27.150.000	Pembe rdayaa n Masya rakat
	Bimbingan supervisi dan pengawasan dana Nagari	Kec. Bukik Barisan	Adanya tim pengawasan dana nagari	5 nagari	24.715.000	Bimbingan supervisi dan pengawasa n dana Nagari	Kec. Bukik Barisan	Adanya tim pengawasan dana nagari	5 nagari	24.715.000	Pembe rdayaa n Masya rakat
	Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kec. Bukik Barisan	Terjaganya ketertiban umum	5 nagari	16.335.000	Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketentrama	Kec. Bukik Barisan	Terjaganya ketertiban umum	5 nagari	16.335.000	Pembe rdayaa n Masya

						n Masyarakat						rakat
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan lainnya	Kec. Bukik Barisan	Adanya tim pengawasan dana nagari	5 nagari	13.674.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan lainnya	Kec. Bukik Barisan	Adanya tim pengawasan dana nagari	5 nagari	13.674.000		Pembe rdayaa n Masya rakat
	JUMLAH				<b>651.532.900</b>	JUMLAH				<b>762.694.900</b>		

Dari tabel 2.2 diatas ada beberapa kegiatan yang belum sesuai antara rencana awal RKPD tahun 2020 dengan Analisa Kebutuhan Tahun 2020, hal ini dapat di terangkan sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, ditargetkan sesuai rencana awal RKPD adalah Rp. 46.625.000,- namun Kebutuhan yang diperkirakan yaitu hanya 15.000.000,- yaitu 32% dari Rencana awal RKPD yang telah ditetapkan.hal ini disebabkan rasionalisasi anggaran tahun 2020 untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai IKU Kecamatan Bukik Barisan yaitu Pilwanag 2 nagari (Nagari Maek dan Nagari Baruah Gunuang) tahun 2020.
- b) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat, ditargetkan sesuai rencana Awal RKPD adalah Rp. 79.435.000,- namun Kebutuhan yang diperkirakan yaitu 222.222.000,- yaitu 279,7% dari Rencana awal RKPD yang telah ditetapkan.hal ini disebabkan Pemenuhan kebutuhan anggaran tahun 2020 untuk kegiatan yang lebih prioritas sesuai IKU Kecamatan Bukik Barisan yaitu Pilwanag 2 nagari (Nagari Maek dan Nagari Baruah Gunuang) tahun 2020 dan Kebutuhan Kontingen Kecamatan Bukik Barisan mengikuti MTQ nasional tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan tahun 2020 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Kecamatan Bukik Barisan tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari dan Kecamatan akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait Pelayanan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah diakomodir dalam Renja Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2020. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 tidak ada penjelasannya.

**Tabel 2.3**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2020**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur
4. Iklim investasi dan usaha
5. Energi
6. Lingkungan hidup dan bencana
7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
8. Pendidikan
9. Kesehatan
10. Ketahanan pangan
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya :
  - a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  - b. Bidang Perekonomian
  - c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Diantara Tugas pokok dan IKU Kecamatan Bukik Barisan tahun 2016-2021 adalah :

#### **I. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan**

Bahwa Berdasarkan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Pasal satu menyebutkan Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei

dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Kecamatan Bukik Barisan telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada Bulan Desember 2019 yang hasilnya bernilai 86,4 yang berarti sangat memuaskan. Survei ini dilakukan telah sesuai dengan metode yang ditetapkan pada Permenpan nomor 14 tahun 2017.

Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bukik Barisan sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 antara lain:

1. Metode pengumpulan data
    - a. Menyusun kuisisioner yang jumlah unsur maupun instrumen pertanyaan yang disurvei disesuaikan dengan jenis layanan.
    - b. Menentukan jumlah responden sesuai dengan tabel populasi
  2. Pengisian kuisisioner
    - a. Dilakukan oleh petugas unit pelayanan dan hasil dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
    - b. Dilakukan oleh petugas dari unit pelayanan dengan mendatangi dan mewawancarai responden dari rumah ke rumah.
- II. Penerapan Program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
- Kecamatan dipandang begitu sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan, karena ada banyaknya pihak dari masyarakat itu sendiri yang mengharapkan demikian. Sebenarnya, Kecamatan dapat berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat apabila dilihat kepada kondisi waktu pelayanan yang tepat, kondisi jarak yang dekat, serta kondisi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan itu sendiri.

Oleh karena posisi Kecamatan diberikan begitu strategis maka dalam pelaksanaannya seorang Camat perlu upaya yang optimal untuk lebih aktif dalam menjalankan tugasnya. Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dia diharapkan dapat melakukan inovasi. Maksud dari inovasi itu sendiri adalah Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dihasilkan melalui metode pendekatan dalam pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan adalah Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Patent).

Berdasarkan PERMENDAGRI No 4 Tahun 2010 pelayanan administrasi terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat menjadi PATEN adalah penyelenggara pelayanan public di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya

dokumen dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu loket/meja pelayanan. Ruang lingkup dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah pelayanan pada bidang perizinan dan pelayanan pada bidang non perizinan

Dalam menjalankan Program Unggulan yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bukik Barisan Mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu dengan pelimpahan wewenang tentang Perizinan dan non perizinan.

Untuk menjalankan Program Paten ini Kecamatan Bukik Barisan Menetapkan Standar pelayanan meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. proses/prosedur pelayanan;
- d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
- e. waktu pelayanan; dan
- f. biaya pelayanan.

Kecamatan Bukik Barisan telah berusaha dengan keras untuk mewujudkan Pelayanan yang prima terhadap masyarakat dengan menggunakan anggaran, Sarana/Prasarana serta Personil yang ada. Upaya yang maksimal tersebut diantaranya memanfaatkan Sarana Komunikasi dan Standar Pelayanan yang dibuat untuk mempermudah dan meringkaskan alur pengurusan izin dan non perizinan di Kecamatan Bukik Barisan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan Tahun 2020**

Selain merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Bukik Barisan, maka Renja Kecamatan Bukik Barisan tahun 2020 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Agar tercapai target Program dan kegiatan yang direncanakan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Kerja Kecamatan Bukik Barisan tahun 2020 yang disesuaikan dengan tujuan yang ada di RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020, yaitu terdiri dari:

#### **1. Tujuan**

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di

Kecamatan.

- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Bukik Barisan untuk Rencana Kerja tahun 2020 mengacu kepada program dan kegiatan.

Terkait dengan program ini maka program pada Kecamatan Bukik Barisan dikelompokkan ke dalam 8 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan Program dan Kegiatan Kec. Bukik Barisan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 3.1**

**Program dan kegiatan Kecamatan Bukik Barisan**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan jasa surat menyurat</li><li>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</li><li>3. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li><li>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li><li>5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor</li> <li>9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>10. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</li> </ul>
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>2. Pengadaan Mebeleur</li> <li>3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor</li> <li>4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> </ul>
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD</li> </ul>
4.	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan</li> </ul>
5.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan</li> </ul>
6.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa</li> </ul>
7.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (Paten)</li> </ul>
8.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan superfisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan,</li> </ul>

	<p>dan Peningkatan Pelayanan Publik</p>	<p>LKPJ dan Produk Hukum Nagari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bimbingan supervisi dan pengawasan dana Nagari</li> <li>3. Patroli siaga Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</li> <li>4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial Raskin dan Kesejahteran sosial lainnya</li> </ol>
--	---	---

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja OPD Kecamatan Bukik Barisan di laksanakan dengan menggunakan Strategi dan Kebijakan yang terintegrasi tidak terpisahkan, Strategi dan kebijakan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Strategi terdiri dari:
  - a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP Kecamatan
  - b. Peningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik.
  - c. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan publik
  - d. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi)
  - e. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di nagari
  - f. Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Bumrag.
2. Kebijakan terdiri dari:
  - a. Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis
  - b. Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait .
  - c. Mengikut sertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik
  - d. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan
  - e. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik
  - f. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.
  - g. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi
  - h. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari
  - i. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari
  - j. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat

Terkait dengan Pendanaan program dan Kegiatan pada Kecamatan Bukik Barisan dikelompokkan ke dalam 8 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas layanan

publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Rumusan Program dan Kegiatan Kec. Bukik Barisan pada tahun 2020 serta Perkiraan Maju tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUKIK BARISAN

Lembar 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan		20%	207,920,900.00				207,920,900.00
0.00.00.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			1,900,000.00			240 Buah	1,900,000.00
	Tersedianya jasa surat menyurat		Kantor Camat Baukik Barisan	240 Buah	1,900,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		1,900,000.00
0.00.00.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan Listrik			3,300,000.00			12 Bulan	3,300,000.00
	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik		Kantor Camat Bukik barisan	12 Bulan	3,300,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		3,300,000.00
0.00.00.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan			62,600,000.00			12 Bulan	62,600,000.00
	Tersedianya jasa administrasi		Kantor Camat Bukik Barisan	12 Bulan	62,600,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		62,600,000.00
0.00.00.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa K3 kantor			16,278,000.00			12 Bulan	16,278,000.00
	Tersedianya jasa K3 Kantor		Kantor Camat Bukik Barisan	12 Bulan	16,278,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		16,278,000.00
0.00.00.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor			2,540,000.00			18 Unit	2,540,000.00
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kantor Camat Bukik Barisan	18 Unit	2,540,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		2,540,000.00
0.00.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			8,635,900.00			12 Bulan	8,635,900.00
	tersedianya alat tulis kantor		Kantor Camat Bukik Barisan	12 Bulan	8,635,900.00	APBDKAB	RUTIN OPD		8,635,900.00
0.00.00.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			5,398,000.00			12 Bulan	5,398,000.00
	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		Kantor Camat Bukik Barisan	12 Bulan	5,398,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		5,398,000.00
0.00.00.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			1,290,000.00			12 Bulan	1,290,000.00
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kantor Camat Bukik Barisan	12 Bulan	1,290,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		1,290,000.00
0.00.00.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			6,000,000.00			3 Unit	6,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kantor Camat Bukik Barisan	3 Unit	6,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		6,000,000.00
0.00.00.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor			26,000,000.00			520 Porsi	26,000,000.00
	Tersedianya makanan dan minuman kantor		Kantor Camat Bukik Barisan	520 Porsi	26,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		26,000,000.00
0.00.00.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			73,979,000.00			12 Bulan	73,979,000.00
	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kantor Camat Bukik Barisan	12 Bulan	73,979,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		73,979,000.00
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan		20%	103,850,000.00				88,850,000.00
0.00.00.02.10.	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana mebeleur			15,700,000.00			4 Unit	15,700,000.00
	Tersedianya sarana mebeleur		Kantor Camat Bukik Barisan	4 Unit	15,700,000.00	APBDKAB	IKU OPD		15,700,000.00
0.00.00.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor			15,000,000.00			1 Unit	0.00
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kecamatan Bukik Barisan	1 Paket	15,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00
0.00.00.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4 (1 unit) roda 2 (3 unit)			73,150,000.00			10 Unit	73,150,000.00
	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda empat dan dua		Kantor Camat Bukik Barisan	10 Unit	73,150,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		73,150,000.00
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan		20%	27,745,000.00				27,745,000.00
0.00.00.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lkhisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Capaian laporan realisasi anggaran			27,745,000.00			12 bulan	27,745,000.00
	Tersedianya capaian laporan realisasi		Kantor Camat Bukik Barisan	12 Bulan	27,745,000.00	APBDKAB	IKU OPD		27,745,000.00
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif		20%	222,222,000.00				79,435,000.00
1.02.07.15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan tim PKK,LKAM,Karang Taruna			222,222,000.00			5 Nagari	79,435,000.00
	Meningkatnya Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dan terpilihnya Wali Nagari Baru di 2		Kecamatan Bukik Barisan	150 Orang	222,222,000.00	APBDKAB	IKU OPD		79,435,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUKIK BARISAN

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Nagari								
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan		20%	16,185,000.00				16,185,000.00
1.02.07.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan			16,185,000.00			40 Orang	16,185,000.00
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan		Kantor Camat Bukik Barisan	40 Orang	16,185,000.00	APBDKAB	IKU OPD		16,185,000.00
4.00.01.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan		20%	59,113,000.00				59,113,000.00
4.00.01.23.06.	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Adanya pelayanan Prima			59,113,000.00			12 Bulan	59,113,000.00
	Terfasilitasinya Kegiatan PATEN di Kecamatan Bukik Barisan		Kecamatan Bukik Barisan	350 Dokumen	59,113,000.00	APBDKAB	IKU OPD		59,113,000.00
4.00.01.24.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan		20%	43,785,000.00				43,785,000.00
4.00.01.24.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya koordinasi dengan Pemerintah Nagari			43,785,000.00			12 Bulan	43,785,000.00
	Tersedianya koordinasi dengan pemerintah nagari		Kantor Camat Bukik Barisan	12 Bulan	43,785,000.00	APBDKAB	IKU OPD		43,785,000.00
5.00.01.36.	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu		20%	81,874,000.00				81,874,000.00
5.00.01.36.01.	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Adanya Tim Pengawasan dana Nagari			27,150,000.00			5 Nagari	27,150,000.00
	Terfasilitasinya Bimbingan supervisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan, LKPJ dan produk Hukum Nagari		Kecamatan Bukik Barisan	2 Kegiatan	27,150,000.00	APBDKAB	IKU OPD		27,150,000.00
5.00.01.36.02.	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Adanya Tim Pengawasan dana Nagari			24,715,000.00			5 Nagari	24,715,000.00
	Terfasilitasinya Bimbingan supervisi dan pengawasan dana Nagari		Kecamatan Bukik Barisan	1 Kegiatan	24,715,000.00	APBDKAB	IKU OPD		24,715,000.00
5.00.01.36.03.	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terjaganya ketertiban umum			16,335,000.00			5 Nagari	16,335,000.00

## NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUKIK BARISAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terfasilitasinya patroli siaga trantibum dan ketertarikan di Kecamatan Bukik Barisan		Kecamatan Bukik Barisan	1 Kegiatan	16,335,000.00	APBDKAB	IKU OPD		16,335,000.00
5.00.01.36.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Adanya Tim Pengawasan dana Nagari			13,674,000.00			5 Nagari	13,674,000.00
	Terfasilitasinya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial Raskin dan Kesejahteraan sosial lainnya		Kecamatan Bukik Barisan	1 Kegiatan	13,674,000.00	APBDKAB	IKU OPD		13,674,000.00
<b>Total</b>									<b>604,907,900.00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat OPD, Kecamatan Bukik Barisan telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan (Renstra Kecamatan Bukik Barisan) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bukik Barisan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing. Sehubungan dengan ini maka Kecamatan Bukik Barisan juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan (Renja Kecamatan Bukik Barisan) tahun 2020. Renja Kecamatan Bukik Barisan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Bukik Barisan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Kecamatan Bukik Barisan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Bukik Barisan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Kecamatan Bukik Barisan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2019, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2020 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Bukik Barisan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Banjar Loweh, Juli 2019  
Camat Bukik Barisan



**WARDI, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19651220 198603 1 005